`BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan informasi telah berkembang dengan sangat pesat, oleh karena itu sudah banyak pula perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang menggunakan sistem informasi untuk meningkatkannya. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan di dalam suatu organisasi dan perencanaannya telebih dahulu tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen yang baik karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kelemahan (masalah). Sistem informasi sudah menjadi bagian yang sangat signifikan dalam perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi informasi dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan akan teknologi dan system informasi yang akurat, efektif dan efisien.

Berkembangnya teknologi komputer mempengaruhi kinerja manusia sebagai operasional sistem sehingga peralihan ke arah sistem informasi yang berbasiskan komputer semakin meningkat. Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu sumber daya organisasi yang harus dimiliki untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada berbagai tingkat manajemen, data dapat diolah menjadi informasi sesuai keperluan manajer sebagai pimpinan

manajemen lini bawah, tengah dan atas. Informasi yang sesuai dengan keperluan manajemen dan manajer, maka haruslah dirancang suatu SIM yang baik, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, terutama di bidang teknologi informasi, menjadi tantangan bagi penyelenggara pemerintah untuk dapat menyikapi dan memanfaatkannya sebagai sarana kerja dalam membantu percepatan pelaksanaan tugas. Teknologi informasi yang didukung oleh teknologi komunikasi maupun teknologi lainnya menjadi unsur yang penting dalam menjembatani data dan informasi dalam segala aspek kehidupan sistem informasi merupakan alat bantu dalam menampilkan, melaporkan, dan memberi informasi kepada semua orang yang membutuhkannya.

Sistem informasi dibuat agar mempermudah dalam pengelolaan data maupun informasi serta memudahkan kita dalam mencari data maupun informasi tersebut. Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta ini seharusnya menjadi potensi dalam pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat dalam hal ini sistem informasi harus bisa menjadi manfaat besar bagi penggunanya.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah, pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu, pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja, pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah berpedoman pada norma: obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan, terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan, efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat, dan mendidik dan

dinamis dari beberapa ketentuan tersebut untuk dapat lebih meningkatkan kinerja pengawasan dalam hal penerapan pengawasan yang berorientasi informasi teknologi (IT) dan dalam upaya pengaksesan yang lebih cepat dan akurat diperlukan sebuah sistem aplikasi pengawasan yang dapat mengakomodir kondisi tersebut. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terdiri dari Sekretaiat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (Bapapsi) Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, kearsipan dan pengembangan sistem informasi yang meliputi perpustakaan, kearsipan, pengelolaan dan pengembangan informasi, pemberdayaan informasi serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sistem Informasi Manajemen Data ini di bangun dengan berbasisikan web, pengertina web sendiri adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya\ berada di dalam *World Wide Web* (WWW) di Internet sehingga dapat diakses dan di *update* langsung melalui media internet oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan SKPD lingkup kabupaten Bandung

(Dinas/Badan/Kantor/RS/Bagian) tentunya melalui otoritas tertentu (*username* dan *password* diperoleh melalui pendaftaran dan diberikan admin di Bapapsi).

Sistem Informasi Manajemen Data. SIM-Data adalah kumpulan data (data gathering) hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintahan di wilayah Kabupaten Bandung yang dihasilkan dari SKPD Kab/Kec sampai dengan Kel/Desa dan sebuah kelengkapan pengelolaan dari proses-proses yang menyediakan informasi untuk bupati guna mendukung operasi-operasi dan pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi.

SIM, masukan yang diberikan berupa data transaksi yang telah diproses, beberapa data yang asli, model-model pengolahan data. Kemudian data-data tersebut akan diproses. Proses yang terjadi berupa pembuatan laporan-laporan yang ringkas, keputusan-keputusan yang rutin dan jawaban dari query yang diberikan. SIM-Data tersebut digunakan oleh SKPD untuk memberikan laoprannya kepada bupati di Kabupaten Bandung.

SIM-Data dibuat karena adanya desakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan adanya trasparansi terhadap laopran-laporan SKPD di Kabupaten Bandung sehingga masyarakat dapat melihat laporan tersebut.

Maka dari itu dengan adanya sistem informasi manajemen data (SIM-Data) laporan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terhadap bupati lebih transparan karena selama ini laporan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak bisa di akses atau masyarakat tidak dapat melihatnya.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti mengambil judul **Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Data (SIM-Data) Dalam Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kepada Bupati Di Kabupaten Bandung (Suatu Studi Pada Badan Perpustakaan, Arsip, Dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Bandung)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian masalah dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIM-Data) dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kemampuan kebijakan dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIM-Data) dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana tahapan dalam proses Sistem Informasi Manajemen Data (SIM-Data) dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data sebagai laporan SKPD kepada Bupati dan tujuan yang diteliti adalah:

1. Untuk mengetahui pengendalian masalah Sistem Informasi Manajemen Data (SIM-Data) dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui kemampuan kebijakan dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIM-Data) dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui tahapan dalam proses Sistem Informasi Manajemen Data (SIM-Data) dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi peneliti, dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti:
   a) Sebagai hal untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan terutama mengenai implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data dalam pelaporan skpd kepada bupati di Kabupaten Bandung.

b) Untuk menyelesaikan studi di Progam Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.

2. Kegunaan teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan:

a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu sosial

b) Dapat dijadikan bahan acuan untuk masa yang akan datang bagi yang melaksanakan penelitian mengenai SIM-Data

3. Kegunaan praktis, dari hasil penelitian diharapkan:

a) Sebagai sarana untuk membandingkan antara teori yang didapat saat perkuliahan dan praktek di lapangan.

b) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam peningkatan laporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung

1.5 Kerangka Pemikiran

Studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Van Meter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

> "Policy *implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* "Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan." (Van Meter dan Horn. 1978:70)

Melihat pendapat tersebut penerapan kebijkan atau implementasi kebijakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan dan mentrasformasikan keputusan menjadi pola-pola operasional.

Berdasarkan pendapat diatas implementasi kebijakan yaitu kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara.

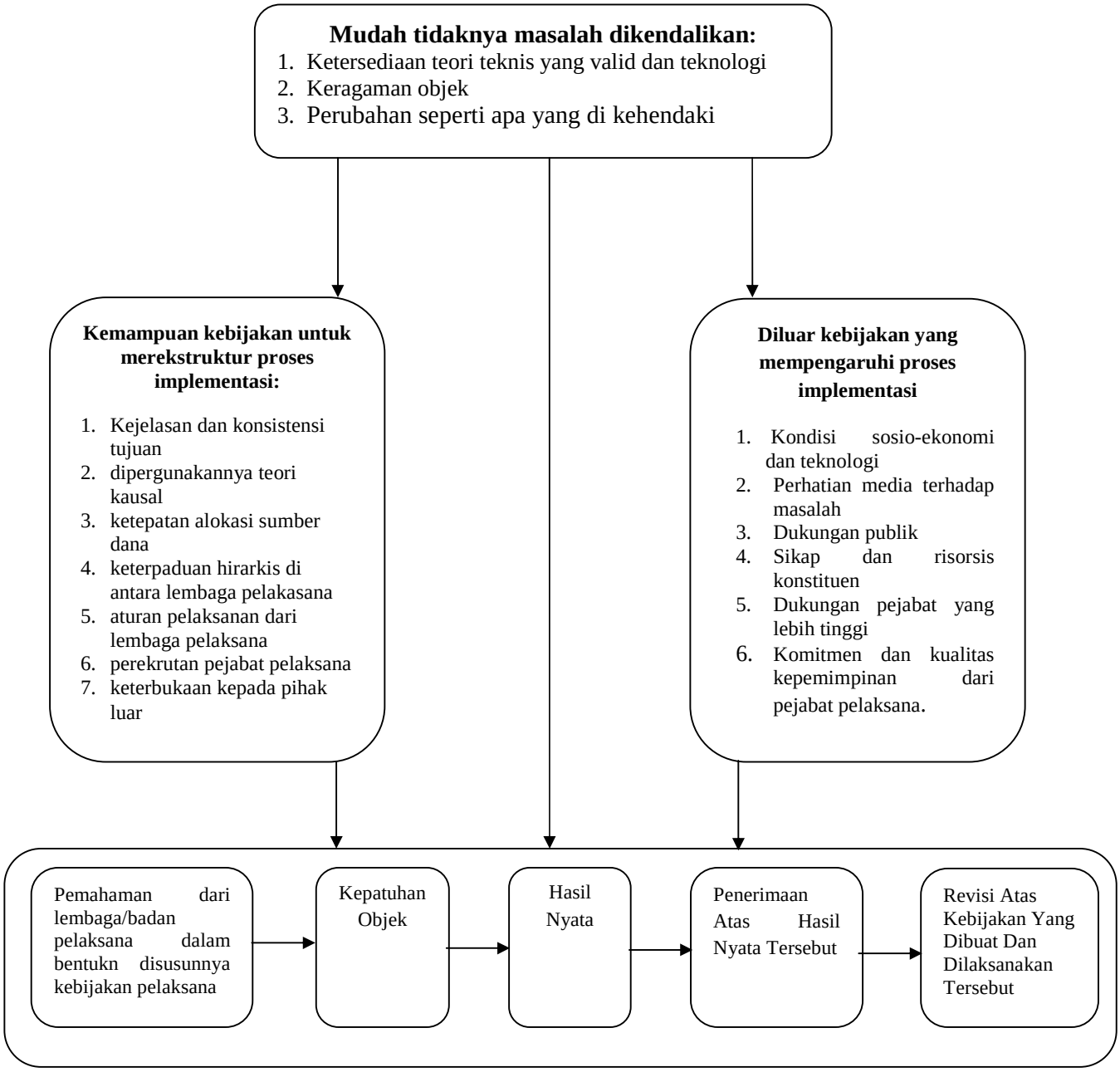
Model Mazmania dan Sabtier di sebut model kerangka analisis implementasi. Mereka mengkalsifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel:

1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang di kehendaki.
2. Kemampuan kebijakan untuk merekstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksanan dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variable di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan

> pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.(Mazmania dan Sabatier,1983:20-39)

Implementasi kebijakan memiliki beberapa tahap dalam proses kebijakannya, proses kebijakan tersebut meliputi tahap mudah atau tidaknya masalah dikendalikan selanjutnya kemampuan kebijakan untuk merekstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Dan yang terakhir meliputi tahapan dalam proses implementasi pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat

Bagan 1.1
Proses Implementasi Kebijakan



(Sumber: Mazmania dan Sabatier)

Mengenai sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang di proses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Definisi sistem informasi menurut Gelinas, Oram, dan winggns adalah

> "Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta meyediakan informasi keluaran kepada para pemakai."(Gelinas, Oram, dan winggns. 1990:40)

Aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. Tak hanya di Negara-negara maju, di Indonesia pun sistem informasi telah banyak diterapkan dimana-mana, seperti di kantor, di pasar swalayan, di bandara, dan bahkan di rumah ketika pemakai bencengkrama dengan dunia Internet. Perlu diketahui bahwa system informasi tidak harus selalu berbentuk kompleks. Dalam bentuk kompleks sistem informasi melibatkan banyak pemakai dan memerlukan sarana jaringan yang memungkinkan pemakai yang tersebar di berbagai tempat yang berjauhan dapat berbagai informasi. Hal-hal yang bisa dikerjakan oleh system informasi tentu saja terkait dengan kemampuan yang dapat dilakukannya, sebagaimanya (Turban, McLean, dan Wetherbe, 1999)

1. Melaksanakan komputerisasi nimerik, bervolume besar dan dengan kecepatan tinggi
2. Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat dan cepat
3. Menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses
4. Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat benyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam suatu tempat atau pada beberapa lokasi
6. Menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia

7. Mengotomasikan proses-proses bisnis yang semiotomatis dan tuigas-tugas yang dikerjakan secara manual
8. Mempercepat pengetikan dan penyutingan
9. Pembiayaan yang jauh lebih murah dari pada pengerjaan secara manual

Kemampuan-kemampuan ini mendukung sasaran bisnis yang mencakup:

1. Peningkatan produktivitas
2. Pengurangan biaya
3. Peningkatan pengambilan keputusan
4. Peningkatan layanan ke pelanggan
5. Pengembangan aplikasi-palikasi strategis yang baru

(Turban, McLean, dan Wetherbe, 1999:20)

Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif yang tentu saja berguna bagi kegiatan bisnis. (Kroenke, 1992). Peningkatan penggunaan sisten informasi ju8ga tidak terlepas dari perhatian manajemen dalam perusahaan terhadap betapa pentingnya manajemen informasi. Dalam hal ini, McLeod (1998) mengemukakan dua alasan, pertama kegiatan bisnis menjadi semakin rumit dan kedua komputer telah mencapai kemampuan yang semakin baik.

Terdapat tiga alasan mendasar untuk semua aplikasi dalam teknologi informasi. Mereka dapat ditemukan dalam tiga peran penting yang dapat dilakukan system informasi untuk sebuah perusahaan: (1) mendukung proses dan operasi bisnis (2) mendukung pengambilan keputusan para (3)pegawai dan manajernya. (O'Brien, 2005:10)

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat dapat ditingkatkan dengan penyebaran informasi pemerintah. Bagi sektor komersial, ketersediaan secara efisien dari informasi pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan aktivitas bisnis yang berhubungan dengan informasi.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintah memungkinkan departemen-departemen untuk mengintegrasikan informasinya. Ketika pemerintah menyadari bahwa informasi yang dikumpulkan merupakan aset yang berharga, pemerintah dapat menggunakannya secara komersial dan mengubahnya menjadi komoditas yang bisa ditukar. Kasus ini, *Informati,Comunication, and Technology* (ICT) berfungsi sebagai medium untuk mentransfer informasi dari sumbernya ke pengguna atau ke pasar.

SIM-Data adalah sebuah model aplikasi elektronik berbetuk web yang berfungsi dalam pelaporan SKPD kepada bupati di kabupaten Bandung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ini di buat berdasarkan hukum Undang-undang RI No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang didalamnya SIM-Data harus secara terbuka, data tersedia setiap saat tanpa dikecualikan dan diumumkan secara serta merta.

Implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data (SIM-Data) dalam pelaporan SKPD kepada Bupati. Sebagai sarana pelaporan SKPD, maka implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data (SIM-Data) dalam pelaporan SKPD kepada Bupati diharapkan dapat mampu memberikan laporan SKPD sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan harapan semuanya.

Berdasarkan penjelasan teori dan konsep di atas, peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. SIM-Data adalah kumpulan data (data gathering) hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintahan di wilayah Kabupaten Bandung yang

dihasilkan dari SKPD Kab/Kec sampai dengan Kel/Desa dan di kelola oelh Bapapsi di kabupaten Bandung.

2. SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terdiri dari Sekretaiat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dalam lingkup Kabupaten Bandung.
3. Implementasi kebijakan adalah kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara. Proses implementasi kebijakan di lihat dari indicator:
    1) Pengendalian masalah adalah aspek-aspek teknis dari permasalahan serta perilaku yang akan diatur dan yang berkenaan dengan indikator sebagai berikut:
        a) Ketersediaan teori teknis yang valid dan teknologi adalah dasar hukum serta sarana dan prasarana untuk implementasi kebijakan SIM-Data dalam pelaporan SKPD kepada bupati di kabupaten bandung.
        b) Keragaman objek adalah sasaran dalam keragaman untuk Implementasi kebijakan SIM-Data dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung.
        c) Perubahan yang di kehendaki adalah keinginan ada perubahan untuk Implementasi kebijakan SIM-Data dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung.

2) Kemampuan kebijakan adalah menjabarkan tujuan-tujuan formal yang akan dicapainya dengan cara menseleksi lembaga-lembaga yang tepat untuk mengimplementasikannya, dengan cara memberikan kewenangan dan dukungan sumber-sumber finansial pada lembaga-lembaga tersebut yang mempengaruhi proses implementasi dengan indikatornya:

a) Didalam Implementasi kebijakan

(a) Kejelasan dan konsistensi tujuan adalah tujuan hukum yang tepat dan jelas peringkat pada pentingnya melayani sebagai bantuan yang sangat diperlukan dalam program evaluasi sebagaimana arahan jelas untuk menerapkan pejabat dan sebagai pendukung sumber daya untuk tujuan tersebut. untuk Implementasi kebijakan SIM-Data dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung.

(b) Penggunaan teori kausal adalah setiap reformasi utama berisi setidaknya secara implisit teori penyebab cara dimana tujuan harus dicapai. pada kenyataannya, salah satu kontribusi utama dari analisis implementasi dibandingkan dengan administrasi publik hanya teori organisasi adalah penekanan pada teori secara keseluruhan untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan sebagai Implementasi kebijakan SIM-Data

dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung.

(c) Ketepatan alokasi sumber dana adalah adanya ketersediaan sumber dana yang mencukupi untuk Implementasi kebijakan SIM-Data dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung.

(d) Keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelakasana adalah adanya keterlibatan antar lembaga pelaksana untuk Implementasi kebijakan SIM-Data dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung.

(e) Aturan pelaksanan dari lembaga pelaksana adalah adanya aturan atau hukum yang berlaku di dalam lembaga pelaksana untuk Implementasi kebijakan SIM-Data dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung.

(f) Perekrutan pejabat pelaksana adalah komitmen para pejabat dalam pencapaian tujuan-tujuan untuk Implementasi kebijakan SIM-Data dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung.

(g) Keterbukaan kepada pihak luar adalah adanya transparansi di dalam Implementasi kebijakan SIM-Data dalam pelaporan SKPD kepada Bupati di Kabupaten Bandung.

b) Diluar implementasi Kebijakan

(a) Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi adalah variasi dari waktu ke waktu dan antara yuridiksi pemerintah dalam sosial, ekonomi, dan kondisi teknologi mempengaruhi kemampuan tujuan hukum. Secara substansial dapat mempengaruhi dukungan politik untuk tujuanan dan karenanya output kebijakan dari lembaga-lembaga pelaksana dan akhirnya pencapaian tujuan-tujuan dalam implementasi kebijakan SIM-Data di Kabupaten Bandung

(b) Perhatian media terhadap masalah adalah adanya peran serta media cetak maupun elektronik dalam implementasi kebijakan SIM-Data di Kabupaten Bandung

(c) Dukungan publik adalah variasi dari waktu ke waktu dan antara yuridiksi dalam dukungan publik untuk hukum (tujuan hukum) adalah kedua variabel yang mempengaruhi implementasi dalam implementasi kebijakan melalaui SIM-Data di Kabupaten Bandung

(d) Sikap dan Sumber daya konstituen adalah perubahan sumber daya dan sikap dan kelompok pemilih terhadap tujuan undang-undang dan output kebijakan dari lembaga-lembaga pelaksana berperan dalam proses

implementasi dalam implementasi kebijakan melalaui SIM-Data di Kabupaten Bandung

(e) Dukungan pejabat yang lebih tinggi adalah penguasa menerapkan lembaga memberikan dukungan untuk tujuan-undangan melalui (1) jumlah dan arah pengawasan (2) penyediaan sumber daya keuangan (3) sejauh mana mandat hukum yang baru dan bertentangan dalam implementasi kebijakan melalaui SIM-Data di Kabupaten Bandung.

(f) Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana adalah komitmen dari pejabat instansi untuk mewujudkan tujuan hukum ini terdiri dari setidaknya dua komponen pertama, prioritas arah dan tujuan ranking di pejabat dan kedua, kemampuan pejabat dalam mewujudkan prioritas tersebut yaitu kemampuan mereka untuk melampaui apa yang biasanya dapat diharapkan dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. dalam implementasi kebijakan melalaui SIM-Data di Kabupaten Bandung.

3) Tahapan dalam proses adalah tahap-tahap dalam melakukan implementasi kebijakan dan dengan lima tahapan, yaitu:

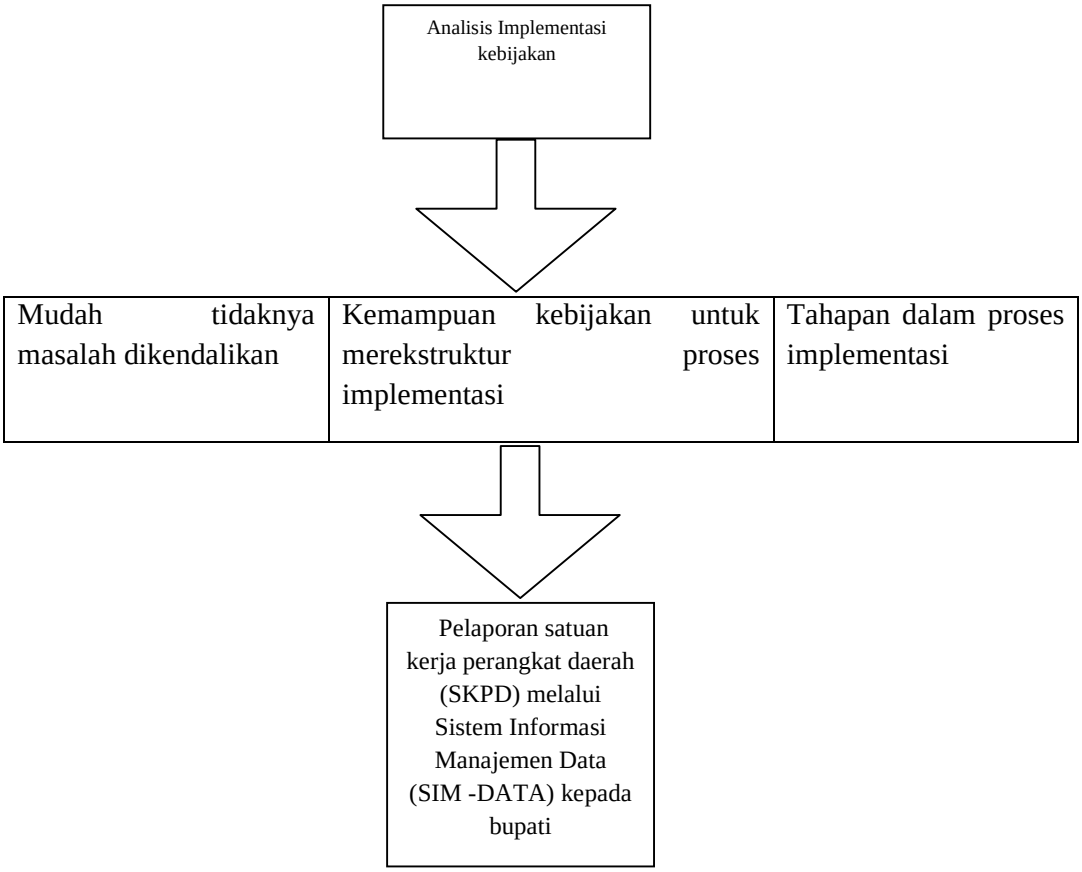
a) Pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana adalah tujuan hukum harus

diterjemahkan ke dalam peraturan substantif, prosedur operasi standar untuk pemrosesan kasus-kasus individual, urusan pengadilan khusus (izin, lisensi) keputusan dan penegakan keputusan urusan pengadilan. dalam implementasi kebijakan melalaui SIM-Data di Kabupaten Bandung

b) Kepatuhan objek adalah mengikuti arahan hukum yang berlaku dalam implementasi kebijakan melalaui SIM-Data di Kabupaten Bandung
c) Hasil nyata adalah hasil untuk mencapai yang diinginkan dalam implementasi kebijakan melalaui SIM-Data di Kabupaten Bandung
d) Penerimaan atas hasil nyata tersebut adalah output yang dihasilnya harus nyata dan dapat di rasakan oleh semua masyarakat dalam implementasi kebijakan melalaui SIM-Data di Kabupaten Bandung
e) Revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar adalah revisi / merumuskan undang-undang yang harus dipandang sebagai tahap memuncak dari asupan jumlah dan arah perubahan atau berusaha mengubah dalam melaksanakan mandat hukum lembaga dan akan menjadi fungsi dari dampak yang dirasakan kegiatan instansi masa lalu dalam implementasi kebijakan melalaui SIM-Data di Kabupaten Bandung

Berdasarkan pada definisi operasional yang telah dijelaskan di atas peneliti membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan 1.2
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung. Hal itu sejalan dengan pendapat Moh.Nazir mendefinisikan metode deskriptif sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini

> adalah untuk membuat deskriptif, gambaran / lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki" (Nazir, 1999:63)

Metode ini menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Penerapan Kebijakan Sistem informasi manajemen data sebagai laporan SKPD kepada Bupati.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

1. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku, majalah, dan surat kabar yang berhubungan dengan implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data sebagai laporan SKPD kepada Bupati serta dokumenter, yaitu format pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan, dokumen atau pun modul yang tersedia.
2. Studi Lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data sebagai laporan SKPD kepada Bupati. Studi lapangan ini terdiri dari:
3. Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam

kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan.

4. Wawancara, melakukan tanya jawab dengan nara sumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai implementasi kebijakan sistem informasi manajemen data sebagai laporan SKPD kepada Bupati

1.6.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Menurut Sanapiah Faisal, teknik pengambilan sampel purposif adalah:

> "Teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu; jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random. Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti" (Faisal, 1999:67)

Informan dalam penelitian ini berdasarkan sumber data dijadikan sebagai informan penelitian sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian di BAPAPSI Bapak Drs. Sartono dipilih karena yang memahami tentang kepegawaian dan sumber daya manusia.
2. Kepala Bidang Pengelohan dan Pengembangan Informasi Di BAPAPSI Ibu Elly Agustini, S.kom.MM dipilih karena

yang memahami tentang pengolahan dan pengembangan SIM-Data

3. Kepala Sub Bidang pengelolaan sistem informasi dan telematika di BAPAPSI Ibu Ratna Nurhayati ST dipilih karena yang memahami tentang pengolahan SIM-Data.
4. Kepala Sub Bidang sarana komunikasi, informasi dan disiminasi di BAPAPSI Bapak Ade Supriatna dipilih karena yang memahami tentang sarana komunikasi dan informasi SIM-Data.
5. Staf Bidang Akutansi dan pelapor di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah di Kabupaten Bandung Bapak Heriyanto dipilih karena yang melakukan proses memasukan laopran ke Sim-Data tersebut
6. Staf Bidang Akutansi dan pelapor di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah di Kabupaten Bandung Bapak Agung Setiawan dipilih karena yang melakukan proses memasukan laopran ke Sim-Data tersebut

1.6.3 Analisa Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Secara operasional teknis analis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknik analisis

data yang dikemukakan Miles dan Huberman (dalam Sugiyanto yang berjudul *Memahami Penelitian Kualitatif adalah:*

1. Pertama, reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan, reduksi data sesudah dilakukan semenjak pengumpulan data. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang dipilih disilang melalui komentar dari informasi yang ebrbeda untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi. Informasi yang berasal dari masyarakat yang menjadi narasumber.
2. Kedua, penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpencar dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang antara lain terkait dengan Penerapan Kebijakan Sistem informasi manajemen data sebagai laporan SKPD kepada Bupati.
3. Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpelasi, dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (*spesific*) sampai dengan rumusan kesimpulan sifatnya umum (*general*).
   (Sugiyanto.2005:30)

Pengertian analisis data tersebut menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Sosial* adalah satu data yang harus dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Data yang di analisis oleh peneliti adalah data kualitatif.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu Badan perpustakaan, arsip dan pengembangan sistem informasi(BAPAPASI) yang beralamat di Komplek Pemda Kab. Bandung Jl. Raya Soreang Km 17 Soreang Telp. (022) 85871417 . Waktu penelitian dimulai dari Bulan Januari 2010 sampai Agustus 2010 yang diawali dengan pembuatan usulan penelitian skripsi, penyusunan laporan penelitian sampai penggandaan skripsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatan	Tahun 2010							
	Januari	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**
Pengajuan Judul Penelitian								
Pengajuan surat ke tempat penelitian								
Bimbingan Usulan Penelitian								
Seminar Usulan Penelitian								
Pelaksanaan penelitian								
Penulisan Skripsi								
Sidang Skripsi								